

SKRIPSI

**PENGARUH KESADARAN DAN TINGKAT INTELEKTUAL
WAJIB PAJAK TERHADAP EFEKTIVITAS
PEMUNGUTAN PAJAK**

**ARDI
10573 03574 12**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2018

SKRIPSI

**PENGARUH KESADARAN DAN TINGKAT INTELEKTUAL
WAJIB PAJAK TERHADAP EFEKTIVITAS
PEMUNGUTAN PAJAK**

ARDI

105730357412

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2018



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Ardi
NIM : 10573 03574 12
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran dan Tingkat Intelektual Wajib Pajak Terhadap Efektivitas Peungutan Pajak.

Makassar, Mei 2018

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi Sastra Satu (S1) pada hari Jumat 25 Mei 2018 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Menyetujui :

Pembimbing I

Dra. Hj. Lilly Ibrahim, M. Si
NBM: 904 976

Pembimbing II

Andi Arman, SE., M.Si. Ak.CA
NIDN: 910612670

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi

Ismail Basudiono, SE, MM
NBM: 903076

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badhollahi, SE., M.Si., Ak., CA
NBM: 1073428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Alamat : Jln.Sultan Alauddin No.259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama ARDI, Nim : 105730357412, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 044 Tahun 1439H/2018M dan telah dipertahankan didepan penguji pada hari Jum'at, 25 Mei 2018, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 10 Ramadhan 1439H
25 Mei 2018M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr.H.Abd.Rahman Rahim,SE.,MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong,SE.,MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE.,MM
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji :
 1. Drs.H.Sultan Sarda, MM 
 2. Ismail Badollahi,SE.,M.SI.,AK.CA 
 3. Faidhul Adzhim, SE.,M.SI 
 4. Samsul Rizal, SE.,MM 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“..... Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(QS.Al Insyirah: 5-8)

Kita dinilai bukan dari apa yang kita lakukan ditengah situasi yang nyaman dan menyenangkan, tetapi dari apa yang kita perbuat ketika berada dalam situasi sulit dan penuh tantangan

(Martin Luther King)

Sukses tergantung bukan hanya pada sebaik apa kita melakukan hal-hal yang kita senang, tetapi juga setekun apa kita melakukan kewajiban yang tidak kita sukai

(John C. Maxwell)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Papa, Mama, kakak serta Adik ku sebagai motivator dan penyemangat hidupku

ABSTRAK

Ardi. 2017. Pengaruh Kesadaran dan Tingkat Intelektual Wajib Pajak Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar. (Dibimbing Oleh **Ibu Lilly Ibrahim dan Bapak Andi Arman**)

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak di wilayah Daerah Makassar tahun 2017, (2) Pengaruh Intelektual Wajib Pajak terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak di wilayah Daerah Makassar tahun 2017, Populasi penelitian ini adalah Pegawai KPP Pratama Makassar Selatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Makassar. Jumlah sampel yang di sebar sebanyak 50 tetapi yang kembali sebanyak 32 orang yang bersedia menjadi Responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak dimana nilai t hitung sebesar $0,028 < 0,05$ (5%). Intelektual Wajib Pajak (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak dengan nilai t hitung sebesar $0,000 < 0,05$ (5%).

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Intelektual Wajib Pajak, Efektivitas Pemungutan Pajak.

ABSTRACT

Ardi. 2017. Popular Awareness and Intellectual Level Taxpayers Effectiveness Tax Collection (KPP) Pratama Makassar South. Thesis. Faculty of Economics and Business. University of Muhammadiyah Makassar. (Guided by Mrs. Lilly Ibrahim and Mr. Andi Arman)

This thesis aims to determine (1) The Effect of Taxpayer Consciousness on the Effectiveness of Tax Collection in Makassar Area 2017, (2) The Intellectual Effect of Taxpayers on the Effectiveness of Tax Collection in Makassar Area 2017. The population of this research is KPP Pratama Makassar Selatan Kantor Territory of the Directorate General of Local Taxes of Makassar. The number of samples in the spread of 50 but who returned as many as 32 people who are willing to become Respondents. Data analysis techniques used in this study is multiple linear regression analysis.

The results of this study indicate that awareness of taxpayers (X1) Significant effect on the Effectiveness of Tax Collection where the value of t arithmetic of $0.028 < 0.05$ (5%). Intellectual Taxpayer (X2) has a significant effect on the Effectiveness of Tax Collection with a value of t arithmetic of $0.000 < 0.05$ (5%).

Keywords: Taxpayer Awareness, Intellectual Taxpayer Level, Tax Collection Effectiveness.

KATA PENGANTAR



Assalamu' Alaikum Wr. Wb.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya atas nikmat iman, kesehatan dan kebahagiaan. Tak lupa salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah hadir sebagai pencerah umat-Nya. Sehingga, peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Kesadaran dan Tingkat Intelektual Wajib Pajak Terhadap Eektivitas Pemungutan Pajak”**.

Skripsi ini disusun dalam upaya memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana pada Jurusan Akuntansi Program Studi S1 Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulisan Skripsi ini dapat terwujud atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah lulus ikhlas memberikan sumbangan berupa pikiran, motivasi dan nasehat. Untuk semua itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

Kedua orang tua penulis, Ibunda tercinta Dahara dan Ayahanda Abdullah yang telah membesarkan dan mendidik penulis secara ikhlas serta memberikan motivasi dan doa yang tiada henti-hentinya. Dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE, MM. Selaku Dekan Fakultas Eonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak, CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dra. Hj. Lilly Ibrahim, M,Si dan Bapak Andi Arman SE, M. Si, Ak, CA masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II ditengah kesibukan yang begitu padat selaku tenaga pengajar dan kesibukan dalam keluarga dan berbagai kesibukan lainnya tapi beliau masih sempat meluangkan waktunya untuk membimbing penulis secara intensif, mengoreksi naskah skripsi serta mendorong agar penulis dapat menyelesaikan studi dengan cepat. Penghargaan yang sangat tinggi kepada beliau atas keteladanan yang diberikan baik sebagai pribadi maupun sebagai pembimbing.
5. Seluruh Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan banyak tambahan pengetahuan, motivasi, bimbingan, dan arahnya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.
6. Pimpinan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara beserta Staf yang telah memberikan bantuan dalam memperoleh data yang dibutuhkan oleh penulis
7. Rekan-rekan seperjuangan Akuntansi Angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam seluruh proses selama berada di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, terimah kasih untuk segala bantuannya.
8. Dan kepada Rina tercinta yang selalu menemani selama pengurusan skripsi.

Akhir kata semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi semua pihak dan semoga Allah SWT membalas semua amal dan

kebaikan kepada pihak – pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Amin.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Makassar, Januari 2018

Penulis

Ardi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penulisan	3
D. Manfaat penulisan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Perpajakan.....	5
B. Pemeriksaan Pajak	10
C. Kesadaran Intelektual	13
D. Sistem Administrasi Perpajakan	15
E. Penelitian Terdahulu	22
F. Kerangka Pikir	23
G. Hipotesis.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Tempat dan Waktu Penelitian	25

B.	Populasi dan Sampel	26
C.	Jenis dan Sumber Data	27
D.	Metode Pengumpul Data	27
E.	Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional	28
F.	Teknik Analisis Data	30
BAB IV	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	35
A.	Sejarah Singkat KPP Pratama Makassar Selatan	37
B.	Wilayah Kerja KPP Pratama Makassar Selatan	38
C.	Visi dan Misi KPP Pratama Makassar Selatan	39
D.	Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan.....	40
E.	Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Makassar Selatan	41
F.	Nilai – nilai Kementrian Keuangan	46
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A.	Deskripsi Objek Penelitian	47
B.	Hasil Pengujian Analis	49
C.	Interpretasi hasil Penelitian	51
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	66
A.	Kesimpulan	68
B.	Keterbatasan	69
C.	Saran	70
	DAFTAR PUSTAKA	71
	LAMPIRAN.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia usaha menggingingkan perkembangan masyarakat untuk meningkatkan segala aktivitas menuntut diadakannya pembangunan disegala sektor guna terwujudnya suatu negara berkembang untuk menuju ke negara maju harus mengadakan pembangunan disegala bidang, seiring dengan itu, menetapkan pembangunan nasional yang merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus.

Guna terwujudnya kemandirian suatu bangsa atau negara dalam usahanya untuk menyikapi masalah pembiayaan pembangunan maka salah satu jalan yang ditempuh pemerintah adalah menggali sumber dana dari dalam negeri yaitu pajak. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar dan sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pada hakekatnya perpajakan di Indonesia di tetapkan berdasarkan undang-undang, hal ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi : “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, antara lain dengan meningkatkan sistem pemungutan pajak.

Sistem yang direncanakan yaitu sebuah sistem informasi dirancang untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang memberikan arah bagi sistem tersebut secara keseluruhan. Data harus diproses untuk menghasilkan informasi dengan menggunakan komponen pemroses, informasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem yang dimasukkan kembali ke dalam sistem sebagai input disebut dengan umpan balik (*feedback*). *Output* sebuah sistem informasi akuntansi biasanya berupa laporan keuangan dan laporan internal.

Penelitian ini di motivasi oleh hasil penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Fitta Amaliah sari (2013) dengan judul Pengaruh kesadaran membayar pajak pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan persepsi yang baik atas efektifitas dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran membayar pajak pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem wajib orang pribadi.

Penelitian ini juga dilakukan oleh Marina Lestari, Kertahadi, Imam Suryadi(2013), dengan judul penelitian Efektivitas Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (Study Pada Kasus KPP Pratama Malang Utara) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian mengatakan bahwa Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak yang diterapkan dapat dikatakan efektif

Penelitian ini merujuk pada penelitian terakhir yang di lakukan oleh Pedrito Dos Santos, Andy Fefta Wijaya, dan Hermawan (2015) dengan judul penelitian Efektivitas Pelayanan dan Pengawasan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian

menunjukkan bahwa Sistem pelayanan yang masih sentralistik pada kantor Direktorat Jenderal (DITJEN) Pajak Timor Leste memberikan dampak yang kurang baik terhadap pelayanan yang diterima masyarakat wajib pajak sebagai pelanggan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul”
PENGARUH KESADARAN DAN TINGKAT INTELEKTUAL WAJIB PAJAK
TERHADAP EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak.
2. Apakah Tingkat Intelektual Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak.

C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh kesadaran dan tingkat intelektual wajib pajak terhadap efektivitas pemungutan pajak.
2. Ada pun manfaat yang diharapkan penulisan adalah sebagai berikut.
 - a. Bagi penulis sendiri, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis terutama yang terkait masalah dalam penulisan ini.
 - b. Bagi akademisi, sebagai bahan bacaan dan referensi bagi penulis lainnya yang tertarik pada bidang ini.

- c. Bagi institusi terkait, sebagai bahan masukan bagi institusi terkait tentang pentingnya kesadaran dan tingkat intelektual wajib pajak terhadap efektivitas pemungutan pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perpajakan

1. Pengertian Perpajakan

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pengertian pajak menurut P.J.A. Adriani dalam Waluyo (2011:2) adalah sebagai berikut:

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan".

Beberapa pengertian pajak lainnya yang dikemukakan para ahli yang dikutip oleh Erly Suandy (2011:9) adalah sebagai berikut:

"M.J.H. Smeets: Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah,

Menurut Erly Suandy (2011:10) ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.

Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.
4. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung”

2. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regular*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak

yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah”.

3. Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2011:12) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini.
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan perbedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut.

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut :
 - a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai Pajak daerah.

4. Asas Pemungutan Pajak

Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan Waluyo (2011:16) sebagai berikut:

1. Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

2. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

5. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:160) mengemukakan tentang cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga *stelse* adalah sebagai berikut:

1. *Stelse* nyata (*rill stelse*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan *stelse* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistik.

2. *Stelse* anggapan (*fictive stelse*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

3. *Stelse* campuran

Stelse ini merupakan kombinasi antara *stelse* nyata dan *stelse* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan,

6. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011:17) sebagai berikut:

1. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

B. Pemeriksaan Pajak

1. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

2. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2011:204) adalah sebagai berikut:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak.
 - a. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
 - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada

waktu yang telah ditetapkan;

3. Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Jenis-jenis pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2011:208) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksaan rutin, adalah pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh unit pemeriksa tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya harus segera dilakukan terhadap:
 - a. Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar;
 - b. Surat Pemberitahuan (SPT) rugi;

Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyalahi penggunaan norma penghitungan. . Batas waktu pemeriksaan rutin lengkap paling lama tiga bulan sejak pemeriksaan dimulai. Sedangkan pemeriksaan lokasi lamanya maksimal 45 hari sejak Wajib Pajak diperiksa. Pemeriksaan rutin terhadap Wajib Pajak yang tahun sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan lengkap dua tahun berturut-turut tidak lagi dilakukan pemeriksaan lengkap pada tahun ketiga.

2. Pemeriksaan khusus, dilakukan setelah ada persetujuan atau instruksi dari unit atasan (Direktur Jenderal Pajak atau kepala kantor yang bersangkutan) dalam hal:
 - a. Terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar;
 - b. Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan;
 - c. Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Pajak atau kepala kantor wilayah (misalnya ada pengaduan dari masyarakat).

4. Metode Pemeriksaan Pajak

Metode pemeriksaan pajak yang sering digunakan menurut Waluyo (2012:380) adalah sebagai berikut:

1. Metode Langsung

Metode langsung tersebut yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.

2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu

2.3.7 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Selama Pemeriksaan

Menurut Waluyo (2012:375) hak dan kewajiban Wajib Pajak selama pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Hak Wajib Pajak selama proses pemeriksaan ini meliputi:

- a. Meminta Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada pemeriksa pajak;
- b. Meminta Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak;
- c. Meminta penjelasan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Pemeriksa Pajak;
- d. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen secara terperinci;

2. Kewajiban Wajib Pajak apabila dilakukan pemeriksaan pajak, maka Wajib

Pajak wajib untuk:

- a. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- b. Memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan;
- c. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu;
- d. Memberikan keterangan secara tertulis maupun lisan yang diperlukan oleh Pemeriksa selama proses pemeriksaan;

C. Kesadaran Wajib Pajak

Munculnya niat individu untuk berperilaku ditentukan oleh tiga factor (Mustikasari, 2007), yaitu :

1. Behavioral Beliefs

merupakan keyakinan individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

2. Normative Beliefs

yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

3. Control Beliefs

merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku individu-individu yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

2.5.3 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

1. Hak Wajib Pajak

Untuk surat pemberitahuan yang disampaikan dengan pos tercatat melalui kantor pos dan giro, maka tanggal pengiriman dianggap sebagai tanggal penerimaan.

Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT pajak penghasilan hanya dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan untuk mengangsur pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya.

Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan penurunan angsuran PPH terhadap pasal 25.

Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan atas pembayaran pajaknya.

Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah penghitungan atau bahkan kekeliruan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak.

Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan kepada DJP atas suatu Surat Ketetapan kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak kurang bayar tambahan, Surat Ketetapan Pajak lebih bayar, Surat Ketetapan Pajak nihil,

2. Kewajiban Wajib Pajak

Mendaftarkan diri ke KPP untuk memperoleh NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah suatu sarana yang diberikan dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenaldiri wajib pajak atau identitas dari Wajib Pajak berbentuk nomor registrasi pokok wajib pajak. Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PengusahaKena pajak. Dalam rangka pelayanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak, formulir Surat Pemberitahuan (SPT) disediakan pada kantor-kantor di lingkungan DJP dan

tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau oleh Wajib Pajak

Wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau melakukan pekerjaan bebas serta Wajib Pajak Badan di Indonesia diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan.

3. Pelayanan Pajak

Pelayanan pajak adalah tindakan dan perlakuan yang ditawarkan melalui administrasi perpajakan dalam bentuk pemberian layanan kepada masyarakat untuk memenuhi kepuasan wajib pajak secara optimal demi tercapainya sebuah harapan dalam meningkatkan pendapatan negara dari pajak.

4. Jenis Pelayanan Dalam Pajak

(Ibtida, 2010) Pelayanan Fiskus dalam perpajakan dapat dilihat dalam 3 (tiga) faktor :

Kualitas Sumber Daya Manusia Kualitas pegawai pajak jelas sangat banyak menentukan efektivitas di dalam pelaksanaan perundang-undangan perpajakan.

Ketentuan Perpajakan Melihat dari perkembangan yang terjadi di Indonesia saat sekarang ini baik dalam sektor perekonomian, perdagangan internasional serta kemajuan teknologi informasi ataupun dari aspek yang lainnya DJP telah melakukan penambahan dalam undang-undang perpajakan. Sistem Informasi Perpajakan.

D. Kesadaran intelektual

1. Pengertian kecerdasan intelektual

Kecerdasan intelektual adalah kecerdasan yang menuntut pemberdayaan otak, hati, jasmani, dan pengaktifan manusia untuk berinteraksi secara fungsional dengan yang lain. Intellectual Quotient atau yang biasa disebut dengan IQ merupakan istilah dari pengelompokan kecerdasan manusia yang pertama kali diperkenalkan oleh Alferd Binet, ahli psikologi dari perancis pada awal abad ke 20. Kemudian Lewis ternman dari unuversitas stanford berusaha membakukan test IQ yang dikembangkan oleh Binet dengan mengembangkan norma populasi, sehingga selanjutnya test IQ tersebut dikenal dengan test Stanford-Binet. Pada saat itu IQ dipahami sebagai pokok dari sebuah kecerdasan seseorang sehingga IQ dianggap menjadi tolak ukur keberhasilan dan prestasi hidup seseorang.

Orang yang kecerdasan intelektualnya baik, baginya tidak akan ada informasi yang sulit, semuanya dapat disimpan, diolah dan diinformasikan kembali pada saat dibutuhkan. Proses dalam menerima, menyimpan dan mengolah kembali informasi biasa disebut "berfikir". Berfikir adalah media untuk menambah perbendaharaan otak manusia.

Ada lima dimensi kemampuan intelektual, yaitu :

1. Kognisi, yang merupakan operasi pokok intelektual dalam proses belajar,
2. Mengingat merupakan proses mental primer untuk retensi atau menyimpan dan reproduksi segala sesuatu yang diketahui intelektual,
3. Berfikir divergen, yaitu operasinya jelas mencakup potensi bakat kreatif, yang bertugas mencoba sesuatu,
4. Berfikir konvergen, yaitu berfikir yang menghasilkan informasi dari informasi yang sudah ada, yang hasilnya ditentukan oleh respon yang diberikan,
5. Evaluasi, yaitu kemampuan mencari keputusan atau mencari informasi dari kriteria yang memuaskan

E. Sistem Administrasi Perpajakan

1. Pengertian Administrasi Perpajakan

Menurut Nurmantu, (1998:53). Administrasi pajak mempunyai dua arti yaitu :

- a. Administrasi Pajak dalam arti luas dapat dilihat sebagai fungsi, sistem, lembaga dan manajemen publik
- b. Administrasi Pajak dalam arti sempit adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak.

Sedangkan Djoned Gunadi M,(2008) mengatakan :

“Administrasi hukum atau legal administration, artinya administrasi yang harus dijalankan adalah bagaimana ketentuan hukum menghendaki khususnya ketentuan hukum formal perpajakan, disini administrasi pajak adalah merupakan instrument dari ketentuan formal perpajakan yang ada.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu(2010:112), menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Safri Nurmantu (2006:148), mendefinisikan kepatuhan perpajakan adalah:

“Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Menurut Ony dtt (2008:69), tentang Pengertian Kepatuhan yaitu : “Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan menurut Pakde Sofa (2008:2) tentang Definisi Kepatuhan Perpajakan yaitu:

Terdapat dua macam kepatuhan, menurut Ony dtt (2008:70) yakni:

1. Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Menurut Ony dtt (2008:70) tentang masalah kepatuhan wajib pajak yaitu: “Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak.

Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi (Devano, 2006:110) sebagai berikut :

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Kepatuhan sebagai fondasi *self assessment* dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen-elemen kunci (Ismawan, 2001:83) tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
- b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, wajib pajak dimasukkan dalam kategori Wajib Pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 tahun 2007 KUP pasal 28, dan dalam hal terhadap wajib pajak.
- e. Menurut Chaizi Nasucha (2005:45), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan

(SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

3. Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah suatu pemenuhan kewajiban perpajakan, yang harus dilakukan Wajib Pajak melalui tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), laporan penyelesaian tunggakan pajak dan laporan perkembangan pembayaran atau penyetoran pajak terutang. Laporan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dapat diketahui atas hasil audit kepatuhan yang diperoleh dari dokumen Wajib Pajak di KPP. Dimensi- dimensi Kepatuhan Wajib Pajak (Y), sebagai berikut :

1. Aspek Yuridis. Pemenuhan kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari ketaatan terhadap prosedur administrasi perpajakan yang ada. Aspek ini meliputi laporan perkembangan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), laporan perkembangan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara presentase yang diisi secara benar dan tidak benar, serta laporan perkembangan penyampaian angsuran berdasarkan perkembangan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.
2. Aspek Psikologis. Kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari persepsi Wajib Pajak terhadap penyuluhan pelayanan dan pemeriksaan pajak.
3. Aspek Sosiologis. Kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari aspek sosial sistem perpajakan, antara lain kebijakan publik, kebijakan fiskal, kebijakan perpajakan, dan administrasi perpajakan.

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap efektivitas pemungutan pajak dengan metode *self assessment* dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

2.1. Tabel
Penelitian Terdahulu

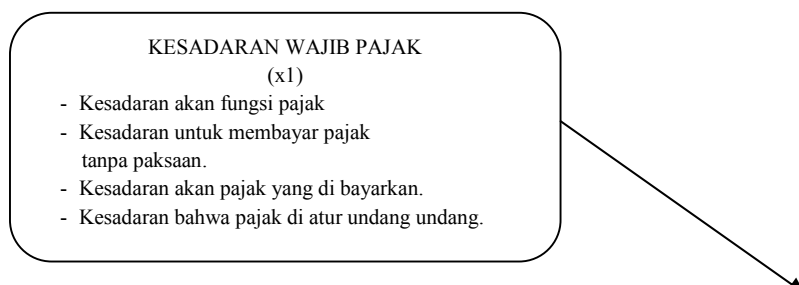
No	peneliti	Judul penelitian	sampel	Hasil penelitian
1.	Reni Priantini Desca (2011)	Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pajak penghasilan	14 orang pemeriksa pajak pada seksi pemeriksaan dan kelompok fungsional pemeriksaan di KPP pratama jakarta tebet.	Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 20.3%
No	peneliti	Judul penelitian	sampel	Hasil penelitian
2.	Fitta Amaliah sari (2013)	Pengaruh kesadaran membayar pajak pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan persepsi yang baik atas	100% responden wajib pajak di KPP pratama subang	Kesadaran membayar pajak pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem wajib orang pribadi

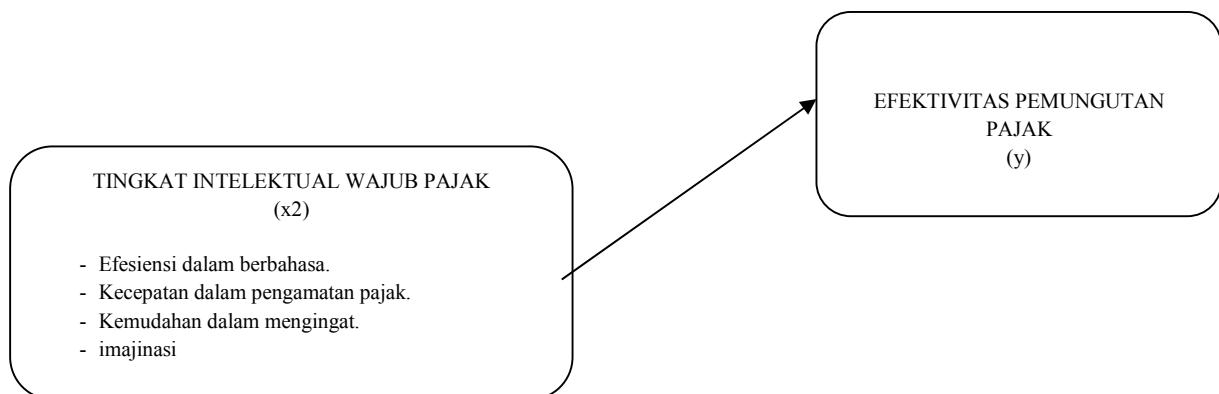
		efektifitas		
3.	Sri Rosa Dewi (2013)	Pengaruh pelaksanaan sistem <i>self assessment</i> terhadap kepuasan dan kepatuhan wajib pajak badan	90 orang responden wajib pajak badan di 3 KPP pratama jakarta	Pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak sebesar 69.1%
4.	Hafsyah Nur Hidayah Harahap (2014)	Pengaruh pemeriksaan pelaksanaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan	11 orang pemeriksaan pajak pada seksi pemeriksaan dan kelompok jabatan fungsional pemeriksaan di KPP pratama bandung karees	pelaksanaan sistem <i>self assessment</i> terhadap kepuasan dan kepatuhan pengaruh tersebut adalah sebesar 52.6%

5.	Nyoman Gita Larasati (2014)	Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak.	60 responden wajib pajak di KPP pratama bandung Cibeunying	Sistem administrasi modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bersama pengaruh sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 18.49%
6.	Marina Lestari, Kertahadi, Imam Suryadi	Efektivitas Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (Study Pada Kasus KPP Pratama Malang Utara)	Deskriptif Kualitatif	Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak yang diterapkan dapat dikatakan efektif
7.	Pedrito Dos Santos, Andy Fefta Wijaya, dan Hermawan, 2015	Efektivitas Pelayanan dan Pengawasan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak.	Deskriptif Kualitatif	Sistem pelayanan yang masih sentralistik pada kantor Direktorat Jenderal (DITJEN) Pajak Timor Leste memberikan dampak yang kurang baik terhadap pelayanan yang diterima masyarakat wajib pajak sebagai pelanggan.

F.Kerangka Fikir

Gambar 2.1
Kerangka pemikiran





G. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas yaitu:

H1: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak.

H2: Tingkat intelektual wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. Waktu penelitian dan penyusunan proposal dilakukan selama kurang lebih 2 bulan yaitu terhitung mulai bulan Maret sampai dengan April 2017.

B. Populasi dan Sampel.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik, kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan sebanyak 50.

Sampel dalam penelitian ini meliputi Kepala Kantor, Kasubbag/Kepala Seksi, Fungsional Pemeriksa Pajak, *Account Representative*, Pelaksana yang berjumlah 50 responden. Penggunaan sampel penelitian ini berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain: pertama, Pegawai KPP Pratama Makassar Selatan yang bekerja sebagai pegawai tetap lebih dari satu tahun. Kedua, Pegawai yang bekerja di bidang akuntansi. Ketiga, Pegawai dalam melaksanakan tugasnya terikat dengan penggunaan teknologi informasi dan pelayanan pajak.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis data pada penelitian ini terdiri dari:
 - a. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk informasi, baik secara lisan maupun secara tertulis.

- b. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk angka-angka.
2. Sumber data pada penelitian ini meliputi:
- a. Data primer, dimana data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan. Data primer disini berupa kuesioner yang dibagikan kepada pegawai yang bekerja di KPP Pratama Makassar Selatan. Data pada kuesioner tersebut berupa:
 - 1) Karakteristik responden yaitu jenis kelamin, umur, jabatan, pendidikan terakhir dan lama bekerja.
 - 2) Tanggapan responden tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja individual.
 - b. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari dokumentasi dan laporan tertulis perusahaan yang dibuat secara berkala.

D. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data, maka penulis mengadakan studi dan pengumpulan data melalui penelitian lapang (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*), sebagai berikut :

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*) yaitu penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan teori tata cara pemungutan pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan Untuk memperoleh data dalam fungsi diperoleh dari buku literatur dan catatan perkuliahan. Disamping itu penulis mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan di bahas dan dapat mendukung penelitian ini.

2. Penelitian Lapang (*Field Research*) yaitu Studi lapangan, untuk memperoleh data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu digunakan metode *survey*. Metode *survey* yang digunakan adalah dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden dalam bentuk daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis. Kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data yang berupa jawaban dari responden. Data kuesioner terdiri dari profil responden, beberapa bagian pertanyaan, masing-masing bagian terdapat beberapa item pertanyaan. Kuesioner yang diberikan sebanyak 50 kuesioner dengan jumlah pegawai pajak yang menggunakan sistem informasi dan pelayanan kepada wajib pajak dengan diberikan jangka waktu pengembalian 10 hari terhitung sejak kuesioner yang diterima oleh responden. Pengisian kuesioner tersebut dimulai pada tanggal 12 April sampai dengan 21 April 2017.

E. Variabel dan Defenisi Operasional

1. Variabel Penelitian.

Penelitian ini terdiri dari variabel terikat dan dua variabel bebas. Variabel terikat (*dependen*) dalam penelitian ini Efektivitas Penerimaan Pajak (Y) sedangkan variabel bebas (*independent*) dalam penelitian ini yaitu Sistem Informasi Perpajakan (X_1) dan Pelayanan Pajak (X_2).

Pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala interval. Skala interval adalah skala pengukuran dimana jarak satu tingkat dengan tingkat yang lainnya sama, oleh karena itu skala interval dapat juga disebut skala unit yang sama (*equal unit scale*). Dimana tingkat preferensi responden menggunakan skala likert 5 poin yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, Ragu- ragu, setuju dan sangat setuju.

Item likert sebuah pernyataan yang responden diminta untuk mengevaluasi sesuai dengan segala jenis kriteria subjektif atau objektif, umumnya tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan diukur.

2. Defenisi Operasional

a. Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

Kesadaran Wajib Pajak Menurut kamus Umum bahasa indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan di taati.

b. Tingkat Intelektual Wajib Pajak (X_2).

Kecerdasan Intelektual merupakan Kecerdasan yang menuntut pemberdayaan otak, hati, jasmani, dan pengaktifan manusia untuk berinteraksi secara fungsional dengan yang lain, IQ merupakan istilah dari pengelompokan kecerdasan manusia yang pertama kali, tes IQ yang di kembangkan dengan mengembangkan norma populasi.

b. Keektifitan Pemungutan Pajak (Y)

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Pada tabel 3.2 dapat dilihat ringkasan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3.2
Variabel dan Indikator
Kesadaran dan tingkat Intelektual wajib pajak

NO	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1.	Efektivitas pemungutan Pajak (Y)	Lima pertanyaan mengenai Efektivitas Pemungutan Pajak dalam penggunaan kesadaran dan tingkat intelektual wajib pajak	Interval
2.	Kesadaran wajib pajak (X_1)	Lima pertanyaan mengenai Kesadaran wajib pajak yang mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak.	Interval
3.	Tingkat intelektual wajib pajak (X_2)	Lima pertanyaan mengenai Tingkat Intelektual wajib pajak Yang mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak.	Interval

Variabel-variabel tersebut diukur oleh instrumen pengukur dalam bentuk kuesioner berskala menggunakan tipe skala *Likert 5 Point*. Skala likert ini berisi 5 (Lima) tingkat jawaban mulai dari 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (Ragu-ragu), 4 (setuju), dan 5 (sangat setuju).

Tabel 3.4
Instrumen Pengukuran Variabel

Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju	0
Tidak Setuju	1
Ragu – ragu	2
Setuju	3
Sangat Setuju	4

F. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui kuesioner berkualitas dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Pengujian tersebut bertujuan untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen.

- a. Uji Validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen alat ukur telah menjalankan fungsi ukurnya. Validitas menunjukkan ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu skala pengukuran disebut valid bila ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Pada penelitian ini uji validitas menggunakan Spearman correlation dan perhitungannya menggunakan SPSS 16.0. syarat minimum yang digunakan untuk dianggap memenuhi syarat adalah $r_{hitung} \geq r_{kritis}$ dimana $r_{kritis} = 0.3$.
- b. Uji Realibilitas menunjukkan seberapa besar suatu instrument tersebut dapat dipercaya dan digunakan sebagai alat pengumpul data. Reliabilitas instrumen yang semakin tinggi, menunjukkan hasil ukur yang didapatkan

semakin terpercaya (reliabel). Semakin reliabel suatu instrument, membuat instrument tersebut akan mendapatkan hasil yang sama, bila digunakan beberapa kali mengukur pada obyek yang sama. Metode reliabilitas yang sering digunakan adalah metode *Alpha Cronbach* menunjukkan sejauh mana kekonsistenan responden dalam menjawab instrumen yang dinilai. Instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,60.

Jika *cronbach's alpha* < 0,6 maka reabiliti dikatakan buruk

Jika *cronbach's alpha* 0,6– 0,77 maka reabiliti dikatakan cukup

Jika *cronbach's alpha* > 0,8 maka reabiliti dikatakan baik

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian di analisis dengan menggunakan uji asumsi klasik dan uji regresi linear berganda. Untuk menguji hipotesis digunakan uji t (parsial), uji F (simultan), dan uji determinasi. Uji asumsi klasik ini terdiri atas uji normalitas data, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal atautkah tidak. Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian signifikansi koefisien regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik dengan melihat grafik histogram, *normal probality plot*, dan Pengujian *kolmogrov- smirnov Test*.

2. Uji Heteroskedastisitas.

Situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil taksiran dapat menjadi kurang atau melebihi dari yang semestinya. Dengan demikian, agar koefisien-koefisien regresi tidak menyesatkan, maka situasi heteroskedastisitas tersebut harus dihilangkan dari model regresi. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji *Rank Spearman* yaitu dengan mengkorelasikan masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual.

Uji Asumsi Analisis Regresi Linear Berganda untuk mengolah dan membahas data yang telah diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Teknik analisis regresi berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara bersama-sama. Bentuk model persamaan analisis regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan: X_1 = Sistem informasi perpajakan

X_2 = Pelayanan Pajak

Y = Efektivitas Penerimaan Pajak

α = Nilai Konstanta

b = Koefisien Variabel

e = Error

Persamaan regresi ini akan digunakan untuk mengetahui apakah sistem informasi perpajakan dan Pelayanan pajak berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak.

Hipotesis adalah pernyataan yang didefinisikan dengan baik mengenai karakteristik populasi. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t (parsial), uji F (simultan), dan uji Determinasi.

1. Uji Parsial (*t-test*) digunakan untuk mengetahui apakah variabel *independet* (X) berpengaruh terhadap variabel *dependen* (Y). Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

a. Menentukan formula hipotesis:

H_0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)

H_a = Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)

b. Menentukan *level of significant*. Dengan $\alpha = 5\%$

c. Tingkat pengujian:

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

d. Menentukan nilai thitung dengan menggunakan SPSS.

e. Menentukan H_0 diterima atau ditolak

Untuk menentukan H_0 diterima atau ditolak dilihat dari tingkat signifikansi. Apabila tingkat signifikansi dibawah 0.05 maka H_0 diterima atau berpengaruh secara signifikan

2. Uji Simultan (*F-test*)

untuk mengetahui bersama-sama apakah secara simultan variabel bebas P1 (X1), variabel bebas P2 (X2) memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel dependen (Y), maka dapat dilakukan uji signifikan dengan hipotesis sebagai berikut:

a. H_0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X1 dan X2) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y)

H_a : terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X1 dan X2) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y)

b. Tingkat pengujian :

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

c. Menentukan tingkat signifikansi Apabila nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dan Apabila nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui persentasi besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Artinya semakin besar nilai R^2 maka akan semakin baik model regresi dengan data yang ada, sehingga semakin tepat model ini bisa digunakan untuk menjelaskan variabel dependen oleh variabel independen. Koefisien determinasi dirumuskan:

$$R^2: \text{Adjusted } R \text{ Square} \times 100\%$$

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Instansi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan merupakan unit kerja vertikal yang berada dibawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan , Barat Dan Tenggara yang berlokasi di Kompleks Gedung Keuangan Negara I di Jalan Urip Sumohardjo KM. 4 Makassar. Sebagai salah satu implementasi dan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang mengubah secara struktural dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KKP Pratama Makassar Selatan merupakan hasil penggabungan dari KPP Makassar Selatan, KKP Makassar Utara, Kantor Pelayanan PBB Makassar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Makassar.

Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak No KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008, KKP Pratama Makassar Selatan secara efektif beroperasi dan resmi dilaunching oleh Menteri Keuangan pada tanggal 9 Juni 2008. Salah satu perubahan yang nyata adalah penambahan “ Pratama”, sehingga berubah dari KKP Makassar Selatan menjadi KKP Pratama Makassar Selatan.

Dengan perubahan nama tersebut , seluruh fungsi dan seksi di KPP mengalami perubahan nama dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan PMK 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Oleh kerana itu, struktur organisasi

mengalami perubahan menjadi 1 Sub Bagian, 9 Seksi, dan Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak.

Berbagai prestasi membanggakan pun telah ditorehkan KPP Pratama Makassar Selatan, diantaranya:

1. Juara 2 Lomba Pelayanan Tingkat Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara tahun 2011
2. Peringkat III Pelayanan Mobil Tax Unit (MTU) tingkat Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.
3. KPP dengan kinerja pemeriksaan terbaik II.
4. Juara 1 Teknis Lapangan, Juara II Futsal, dan Juara II Bulutangkis Pekan Olahraga Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara dalam rangka hari Keuangan ke-65.
5. Juara Umum Kick Off Nilai-nilai Kementerian Keuangan RI.
6. Piagam Penghargaan dan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara atas penerimaan pajak tahun 2011 lebih dari 100 %.
7. Piagam penghargaan dan Dirjen Pajak atas prestasi dalam mempertahankan /meningkatkan kinerja dalam rangka pengamanan penerimaan pajak tahun 2011.

B. Wilayah Kerja KPP Pratama Makassar Selatan

KPP Pratama Makassar Selatan adalah salah satu KPP dari 3 (tiga) KKP di Kota Makassar, yang mencakup 4 wilayah administrasi Kecamatan yaitu : Rappocini, Makassar, Panakkukang, Manggala. Total luas wilayahnya mencapai 52.94 Km², dengan jumlah penduduk sebanyak 466.272 jiwa atau 95.980 kepala rumah tangga. Dibandingkan dengan Kota Makassar, luas wilayah KPP Pratama Makassar Selatan mencakup 30.12 persen luas wilayah

Kota Makassar. Dari luas wilayah tersebut, KKP Pratama Makassar Selatan melingkupi sebanyak 28.67 persen jumlah kelurahan dengan total penduduk sebanyak 37.19 persen atau sebesar 32.38 persen kepala keluarga di Kota Makassar. Dari luas wilayahnya, KKP Pratama Makassar Selatan didominasi wilayah Kecamatan Manggala yang mencapai 46 persen, disusul oleh Kec Panakkukang sebesar 32 persen, Kec Rappocini 17 persen, dan terakhir Kec Makassar yang hanya 5 persen. Namun demikian, luas wilayah tidak mencerminkan potensi pajak yang salah satunya dilihat dari jumlah penduduknya.

C. Visi dan Misi KPP Pratama Makassar Selatan

1. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak

a. Visi “Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di Asia Tenggara.”

b. Misi Direktorat Jenderal Pajak

“Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka menbiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.”

2. Visi dan Misi KPP Pratama Makassar Selatan

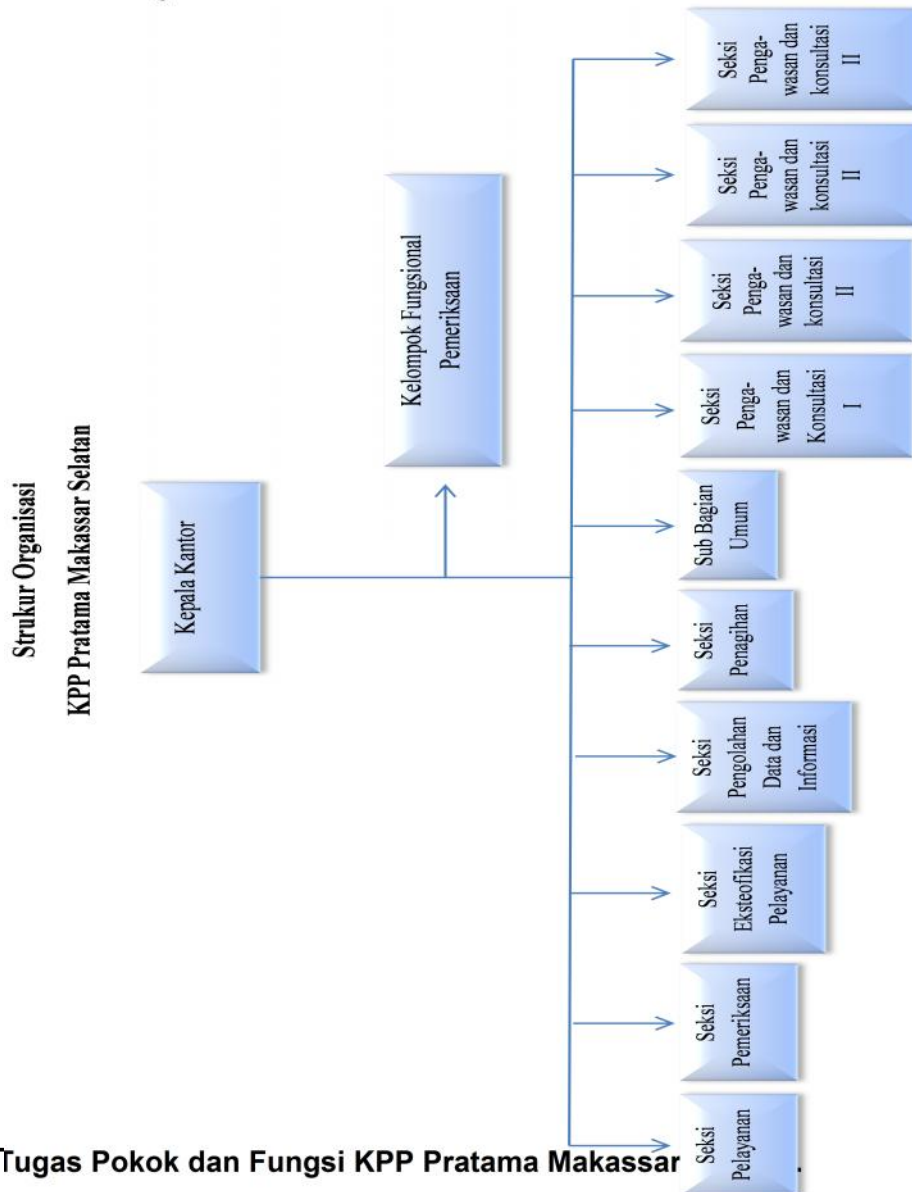
a. Visi KPP Pratama Makassar Selatan

“Menjadi kantor pelayanan pajak terbaik dalam pelayanan, terdepan dalam penerimaan, profesional dan dipercaya oleh masyarakat.”

b. Misi KPP Pratama Makassar Selatan

“Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan prima untuk menghimpun penerimaan negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan.”

D. Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan.



E. Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Makassar

Pembagian Seksi dan Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut : Subbagian Umum, Seksi Pelayanan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Ada 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi), Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan, Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Kelompok Jabatan Fungsional Penilai. Adapun seksi-seksi pada KPP Pratama Makassar Selatan sebagai berikut :

1. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama terdepan untuk memberikan pelayanan dan berhubungan langsung dengan Wajib Pajak melalui “Tempat Pelayanan Terpadu” atau biasa disingkat TPT. Tugas Pokok dari Seksi Pelayanan adalah : Memberikan Pelayanan Kepada Wajib Pajak berupa :

- a. Pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- c. Pelayanan Penyampaian SPT Tahunan
- d. Pelayanan Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM, dan PPh

2. Seksi Pemeriksaan dan Fungsional Pemeriksa Pajak

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta Administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. Tugas Pokok Seksi Pemeriksaan : Melakukan tugas tugas pemeriksaan atas dokumen perpajakan.

- a. Melakukan penyesuaian rencana pemeriksa pajak agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
- b. Menyusun daftar Nominatif dan atau lembar penugasan pemeriksaan wajib pajak yang akan diperiksa.

- c. Menerbitkan dan maenyalurkan surat perintah pemeriksaan pajak (SP3), Surat Pemberitahuan pemeriksaan pajak dan surat pemanggilan pemeriksaan pajak.
- d. Mengajukan usulan permohonan perluasan pemeriksaan
- e. Melakukan pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai dengan rencana yang di tetapkan.

3. Seksi Ekstensifikasi Pelayanan

- a. Melakukan pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk pada seksi Ekstensifikasi perpajakan.
- b. Melaksanakan penerbitan surat himbauan kepada masyarakat untuk memiliki NPWP.
- c. Melaksanakan surat penerbitan data potensi perpajakan dalam rangka pembuatan monografi fiscal.
- d. Melaksanakan penyelesaian permohonan surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak.
- e. Menetapkan penerbitan daftar nominatif untuk usulan SP3 PSL Ekstensifikasi.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha, penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, serta penyiapan laporan kinerja. Tugas pokok dari Seksi PDI adalah:

- a. Menyusun estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.

- b. Melaksanakan pengumpulan data dan pengolahan data.
 - c. Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran informasi dalam rangka pemanfaatan data perpajakan.
 - d. Melaksanakan perekaman dan validasi dokumen perpajakan.
 - e. Melaksanakan perbaikan (updating).
 - f. Melaksanakan pelaksanaan dukungan teknis pemanfaatan aplikasi e-SPT dan E-Filing.
 - g. Melaksanakan kegiatan teknis oprasional komputer.
 - h. Melaksanakan penyediaan informasi perpajakan.
 - i. Menyusun laporan pertanggungjawaban
5. Seksi Penagihan
- a. Menyusun penyesuaian rencana kerja seksi penagihan
 - b. Melaksanakan penatausahaan SKPKB/SKPKBT/ STP/ STB beserta lampirannya dan surat pembayaran pajak (SSP / STTP / SSB) beserta bukti pemindahbukuan dalam rangka pengawasan tunggakan dan pelunasan pajak.
 - c. Melaksanakan penatausahaan surat setoran bukan pajak (SSBP) atau pelaksanaan SP dan SPMP.
 - d. Melaksanakan penatausahaan surat keputusan pembetulan, keputusan keberatan, keputusan pengurangan, keputusan peninjauan kembali, surat keputusan pelaksanaan putusan banding beserta putusan banding.
 - e. Menyusun konsep surat keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

6. Sub Bagian Umum.

Sesuai dengan tugas pokoknya, Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok untuk melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. Sesuai dengan uraian tersebut Sub Bagian Umum KKP Pratama Makassar Selatan telah menjalankan tugas-tugas utamanya untuk menunjang kelancaran tugas menghimpun penerimaan. Sub Bagian Umum terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu :

- 1) Sub Bagian Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Bagian Rumah Tangga

Tugas Pokok Sub Bagian Umum adalah:

- a. Pengurusan surat masuk ke KPP Pratama Makassar Selatan yang bukan dari Wajib Pajak.
- b. Pengurusan surat-surat yang diterbitkan KKP Pratama Makassar Selatan.
- c. Membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian.
- d. Penyelenggaraan Administrasi DP3, LP2P, KP4.
- e. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL)
- f. Menyelenggarakan inventarisasi alat perlengkapan kantor.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) I s/d IV

- a. Meneliti Estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak perkembangan ekonomi dan keuangan.

- b. Meneliti pengawasan kepatuhan formal wajib pajak serta penelitian dan analisa kepatuhan material wajib pajak atas pematuhan kewajiban perpajakannya.
- c. Menetapkan pembuatan/pemutakhiran profil wajib pajakk serta usul rencana kunjungan kerja lokasi wajib pajak dalam rangka pengawasan dan pemuktahiran data wajib pajak .
- d. Meneliti pelaksanaan rekonsiliasi data Wajib Pajak (Data Matching).

F. Nilai – nilai kementerian Keuangan

Nilai- Nilai Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak dalam lingkungan (DJP) sebagai berikut:

Tabel 4.1

Nilai – Nilai Kementerian Keuangan

Nilai	Makna	Perilaku
Integritas (Integrity)	Berfikir,berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya 2. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela
Profesionalisme	Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas. 2. Berkerja dengan hati
Sinergi	Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati 2. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik

	dan berkualitas	
Pelayanan (Service)	Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku 2. Bersikap proaktif dan cepat
Kesempurnaan (Excellence)	Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perbaikan terus menerus 2. Mengembangkan inovasi dan kreatifitas.

Sumber: Data diolah dari hasil Penelitian, 2017

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai KPP Pratama Makassar Selatan dalam penggunaan Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Intelektual Wajib Pajak secara umum. Hal ini disebabkan karena pembagian tugas yang bermacam-macam pada setiap jabatan pegawai KPP Pratama Makassar Selatan. Pembagian tugas aplikasi seperti subbagian umum, Kepala seksi, Kepala kantor, Pelaksana, *Account Representative*, Fungsional Pemeriksa pajak. Kuesioner yang dibagikan disertai surat ijin penelitian dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar. Identitas responden dijamin kerahasiannya serta tujuan penelitian yang mana hanya untuk kepentingan ilmiah semata.

Pegawai yang bekerja di KPP Pratama Makassar Selatan terdiri dari 104 orang Pegawai dan semuanya menggunakan teknologi informasi. Jabatan karyawan tersebut meliputi 1 Kepala Kantor, 9 Kepala Seksi, 43 Pelaksana, 38 *Account Representative* dan 13 Fungsional Pemeriksa Pajak.

Pembagian kuesioner tersebut dimulai pada tanggal 12 April 2017 dan diambil kembali pada tanggal 21 April 2017. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 50 kuesioner sedangkan kuesioner yang kembali sebanyak 32 kuesioner dan yang tidak kembali sebanyak 18 kuesioner. Hal ini disebabkan karena kesibukan Pegawai KPP Pratama Makassar Selatan sehingga tidak semua pegawai sempat untuk mengisi kuesioner pada saat

survei dilakukan. Jumlah kuesioner yang dapat digunakan sebanyak 32 yang bersedia untuk menjadi responden.

Tabel 5.1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah Data
Jumlah kuesioner yang dikirim	50
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	18
jumlah kuesioner yang dapat digunakan	<u>32</u>
	100
Tingkat pengembalian yang digunakan : $32/50 \times 100\%$	64 %

Sumber: Data diolah dari hasil Penelitian, 2017

2. Karakteristik Data Responden

Berdasarkan data kuesioner yang telah dikumpulkan maka dapat dilihat profil Responden Pegawai KPP Pratama Makassar Selatan berdasarkan jenis kelamin, umur, jabatan, pendidikan terakhir dan lama bekerja.

Tabel 5.2
Profil Responden Pegawai KPP Pratama Makassar Selatan

Keterangan	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin:		
Wanita	19	59,37%
Pria	13	40,62%
Umur:21-25	1	3,1%
26-30	9	28,12%
31-35	18	56,25%
36-40	4	12,5%
Tugas/Jabatan:		
Account Representative	16	50%
Pelaksana	17	53%
Pendidikan:		
D3	1	3,1%
S1	26	81,25%
S2	5	15,62%
Lama bekerja:		
1-5	3	9,37%
6-10	17	53,12%

11-15	8	25%
16-20	4	12,5%

Sumber: Data diolah dari hasil Penelitian, 2017

Berdasarkan pada tabel 5.2 mengenai gambaran umum profil responden dapat diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah laki laki sebanyak 19 orang (59,37 %) dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 13 orang (40,62 %). Ini berarti bahwa pegawai laki-laki pada Kantor Pelayanan Pajak lebih dibutuhkan. Proporsi responden terbesar bekisar pada kelompok umur 31-35 tahun yaitu sebesar 18 orang (56,25 %) karena pada usia tersebut merupakan usia kerja yang produktif, sedangkan responden terkecil pada kisaran 21-25 tahun sebanyak 1 orang (3,1 %).

Jabatan Responden sebagian besar adalah pelaksana dengan jumlah 17 orang (53 %). Selain itu, dijelaskan bahwa tingkat pendidikan responden yang terbanyak adalah pada tingkat S1 yaitu sebanyak 26 orang (81,25 %). Responden yang lama bekerja lebih dari 10 tahun merupakan responden yang terbesar yaitu sebanyak 17 orang (53, 12%). Hal ini berarti bahwa kinerja karyawan pada KPP Pratama Makassar Selatan cukup baik karena loyalitas karyawan pada perusahaan tersebut.

B. Hasil Pengujian Analisis

1. Uji Validitas dan Realibilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan *Spearman correlation* dan perhitungan menggunakan *SPSS 16.0 for windows*. Syarat minimum yang digunakan untuk dianggap memenuhi syarat adalah $r_{hitung} \geq r_{kritis}$ dimana $r_{kritis} = 0.3$. Suatu pernyataan dikatakan valid jika pernyataan

tersebut mampu mengungkapkan apa saja yang hendak diukur. Untuk hasil perhitungan *Spearman correlation* (output-nya) sebagaimana terlampir.

Dalam penelitian ini, terdapat 15 item pernyataan, dimana seluruh item pernyataan dikatakan valid karena telah memenuhi syarat $r_{hitung} \geq r_{kritis}$ dimana $r_{kritis} = 0.3$. Rincian pengujian validitas dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 5.3

Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

No. Butir Instrumen	Koefisien Korelasi (r)	Nilai Batas Korelasi (r)	Keterangan
1	0.729	0.3	Valid
2	0.809	0.3	Valid
3	0.881	0.3	Valid
4	0.859	0.3	Valid
5	0.665	0,3	Valid

Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

Tabel. 5.4

Uji Validitas Tingkat Intelektual Wajib Pajak (X_2)

No. Butir Instrumen	Koefisien Korelasi (r)	Nilai Batas Korelasi (r)	Keterangan
1	0.832	0.3	Valid
2	0.871	0.3	Valid
3	0.858	0.3	Valid
4	0.872	0.3	Valid
5	0.722	0.3	Valid

Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

Tabel. 5.5

Uji Validitas Efektivitas Pemungutan Pajak (Y)

No. Butir Instrumen	Koefisien Korelasi (r)	Nilai Batas Korelasi (r)	Keterangan
1	0.747	0.3	Valid
2	0.856	0.3	Valid
3	0.889	0.3	Valid
4	0.796	0.3	Valid
5	0.569	0.3	Valid

Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

Berdasarkan table 5.3, 5.4 dan 5.5 tersebut menunjukkan tingkat validitas dari instrument yang digunakan sangat bagus. Dengan demikian 15 item instrument dapat melanjutkan pengujian berikutnya.

b. Uji Realibilitas

Pengujian realibilitas (keandalan) dilakukan setelah pengujian validitas dan hanya dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan yang valid saja. Berdasarkan hasil pengujian validitas terdapat 15 pernyataan yang valid, maka pernyataan tersebut dapat diuji reliabilitasnya. Uji realibilitas berfungsi untuk menguji apakah item pertanyaan didalam kuesioner dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Untuk menginterpretasikan tinggi rendahnya realibitas instrument, teknik pengujian reabilitas ini menggunakan teknik uji statistik Cronbach Alpha, hasil perhitungan menunjukkan reliabel bila koefisien alphanya (α) lebih dari 0.60 artinya kuesioner dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk penelitian.

Hasil dari pengujian reliabel data untuk variabel independen dan dependen dalam penelitian ini yakni kesadaran wajib pajak, tingkat intelektual wajib pajak dan efektivitas pemungutan pajak dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.6

Uji Realibilitas

Variabel	Koofesien Reliabilitas (α)	Nilai batas Alpha (α)	Keputusan
Kesadaran WP(X_1)	0.848	0.60	Reliabel
Tingkat Intelektual WP (X_2)	0.888	0.60	Reliabel
Efektivitas Pemungutan Pajak (Y)	0.831	0.60	Reliabel

Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

Berdasarkan data pada tabel 5.6 tersebut diatas menunjukkan bahwa angka-angka dari nilai *alpha cronbach's* pada variabel independen dan dependen dalam penelitian ini, semuanya menunjukkan besaran diatas nilai 0,60. Hal ini berarti bahwa seluruh pernyataan untuk variabel independen dan dependen adalah reliabel dan dapat disimpulkan bahwa instrument pernyataan koesioner menunjukkan kehandalan dalam mengukur variabel-variabel dalam model penelitian.

2. Perhitungan Koefisien Regresi

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda, adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Untuk mendapatkan nilai dari persamaan regresi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.7

Pengujian Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.273	.909		1.400	.172		
K WP	.334	.144	.337	2.310	.028	.126	7.915
Tingkat Intelektual WP	.601	.138	.637	4.366	.000	.126	7.915

a. Dependent Variable:
EFEKTIVITAS

Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen (Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Intelektual Wajib Pajak) terhadap variabel dependen yaitu Efektivitas Pemungutan Pajak. Hasil perhitungan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1.273 + 0.334X_1 + 0.601X_2 + e$$

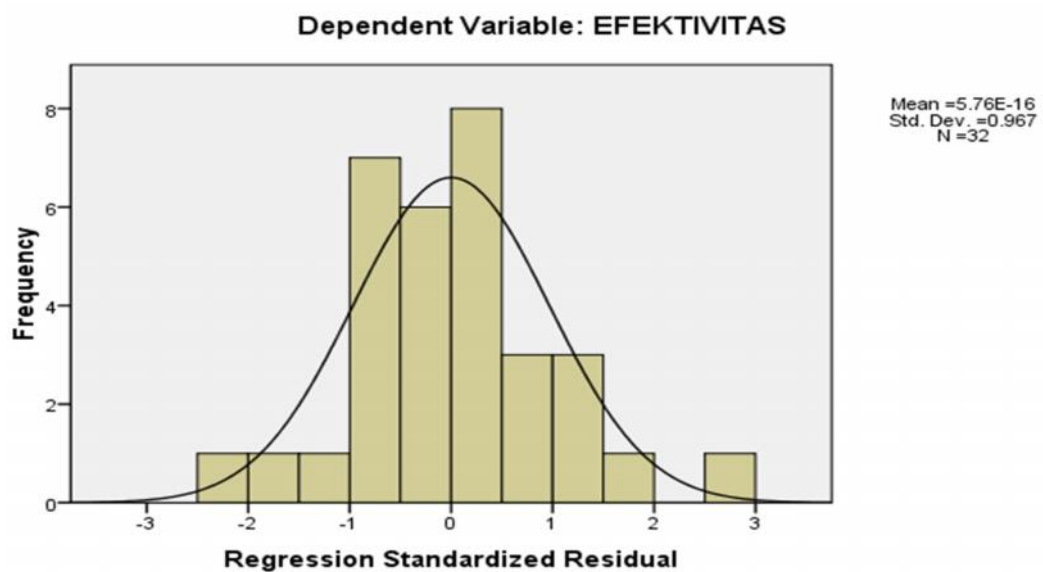
Berdasarkan data di atas nilai konstanta sebesar 1,273 dimana apabila Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Intelektual Wajib Pajak mengalami penurunan atau kenaikan maka akan tetap berada di nilai 1.273. Dan Koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak (X_1) sebesar 0.334, Tingkat Intelektual Wajib Pajak (X_2) sebesar 0,601 ini menunjukkan apabila terjadi peningkatan Efektivitas pemungutan pajak sebesar 1% maka akan mengalami peningkatan, dengan asumsi variable konstanta tetap dan variable lain tidak mempengaruhi.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. Cara mendeteksi normalitas dilakukan dengan melihat grafik *histogram*.

Gambar5.1
Grafik Histogram



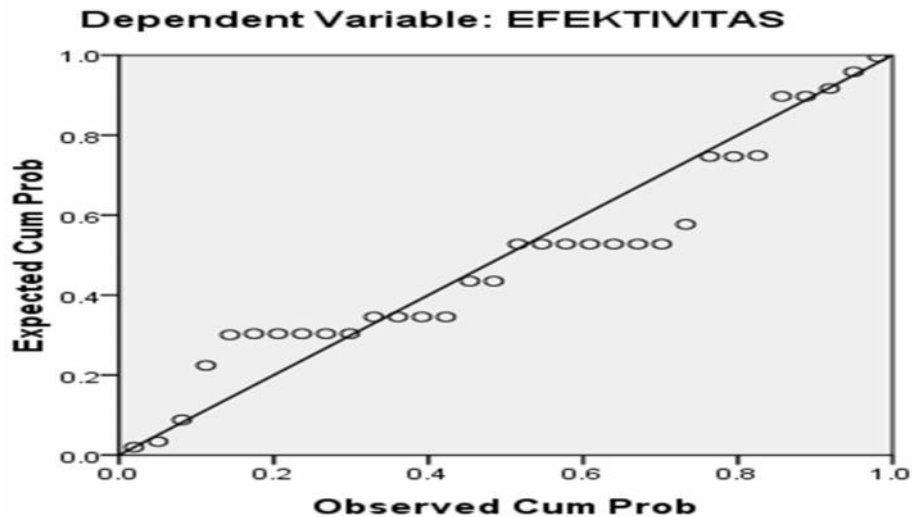
Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

Berdasarkan grafik histogram diatas, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal, hal ini dibuktikan dengan melihat bahwa grafik membentuk simetris dan mengikuti garis diagonal.

Metode yang handal adalah dengan melihat *normal probability plot*. Pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal.

Gambar. 5.2
Normal Probability Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan *Normal P-P Plot* menunjukkan bahwa titik-titik (dot) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal walaupun beberapa titik-titik agak menjauh di garis diagonal, ini menunjukkan bahwa model tersebut telah memenuhi syarat asumsi normalitas. Melihat kedua grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

Pengujian Kedua yang digunakan adalah *Kolmogorov-Smirnov Test*. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai probabilitas (*Asym Sign*) lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05).

Tabel 5. 8

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.54338236
Most Extreme Differences	Absolute	.190
	Positive	.190
	Negative	-.170
Kolmogorov-Smirnov Z		1.075
Asymp. Sig. (2-tailed)		.198
a. Test distribution is Normal.		

Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

Hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa variabel independen dan dependen memiliki data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dari nilai propabilitas (*asymp.sign*) *Kolmogorov-Smirnov Test* yang diperoleh sebesar 0.198 nilai tersebut lebih besar dari 0.05. Dengan demikian pengujian regresi untuk pengaruh Kesadaran dan Tingkat Intelektual Wajib Pajak terhadap Pemungutan Pajak dapat dilanjutkan.

b. Uji Heteroskedastisitas

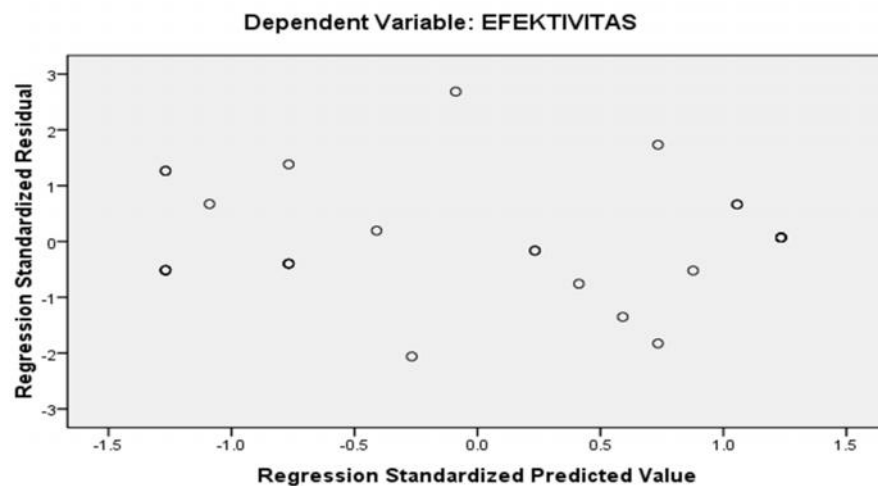
Menunjukkan bahwa variansi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena data *cross section* memiliki data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). Untuk mendeteksi adanya Heteroskedastisitas, metode yang digunakan adalah metode chart (diagram *Scatterplot*). Jika:

- 1) Jika ada pola tertentu terdaftar titik-titik, yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi Heteroskedastisitas.
- 2) Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Gambar 5.3

Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot



Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

Berdasarkan diagram diatas, maka dapat dilihat bahwa data tersebar secara acak dan tidak membentuk satu pola tertentu, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadinya perbedaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dengan demikian pengujian regresi untuk pengaruh Kesadaran dan Tingkat Intelektual Wajib Pajak terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak dapat dilanjutkan.

1	(Constant)	1.273	.909		1.400	.172		
	KWP	.334	.144	.337	2.310	.028	.126	7.915
	INTELEKTUAL	.601	.138	.637	4.366	.000	.126	7.915

a. Dependent Variable:
EFEKTIVITAS

Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

Dari tabel 5.9, diatas dapat dilihat hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel:

1) Kesadaran Wajib Pajak (X_1) terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak

(Y). Pada tabel diatas yaitu pada nilai t dengan nilai $df = n - k - 1 = 32 - 2 - 1 = 29$ maka t_{tabel} diperoleh yaitu 1.699. Pada tabel 5.9 Sistem Informasi Perpajakan $t = 2.310$, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.310 > 1.699$. Maka H_a diterima yang berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak dan berpengaruh positive dan signifikan dikarenakan nilai signifikan $0.028 < 0.05$.

2) Uji Tingkat Intelektual Wajib Pajak (X_2) terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak (Y)

Uji t dapat dilihat pada tabel diatas yaitu pada nilai t dengan nilai $df = n - k - 1 = 32 - 2 - 1 = 29$ maka t_{tabel} diperoleh yaitu 1.699. Pada tabel 5.9 Pelayanan Pajak $t = 4.366$, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4.366 > 1.699$. Maka H_a diterima yang berarti berpengaruh terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak dan berpengaruh secara positive dan signifikan terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak dikarenakan nilai signifikan $0.000 < 0.05$.

b. Uji Simultan (Test-F)

Uji signifikansi simultan atau uji f bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi 0,05. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sebaliknya Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil uji simultan:

Tabel 5.10
Hasil Uji Statistik F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	108.066	2	54.033	171.192	.000 ^a
Residual	9.153	29	.316		
Total	117.219	31			

a. Predictors: (Constant), KESADARAN, Tingkat Intelektual WP

b. Dependent Variable: EFEKTIVITAS

Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

Dari uji F, didapat F_{hitung} sebesar 171.192 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0.05 maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi Efektivitas Pemungutan Pajak. Hasil F_{hitung} tersebut jika dibandingkan dengan F_{tabel} pada tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 0.05$). Diketahui bahwa F_{hitung} yang dihasilkan sebesar 171.192, lebih besar dari F_{tabel} pada signifikansi $\alpha = 0.05$. Ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X_1), dan Tingkat Intelektual Wajib Pajak (X_2) berpengaruh secara simultan terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak.

c. Uji Determinasi

Koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien ini dicari untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Intelektual Wajib Pajak Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak. Nilai koefisien sebesar 1 menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan 100% tepat (sempurna) dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data maka diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebagai berikut:

Tabel 5.11
Uji Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.960 ^a	.922	.917	.562	2.036

a. Predictors: (Constant), KESADARAN, TINGKAT INTELEKTUAL WP

b. Dependent Variable: EFEKTIVITAS

Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas, nilai *Adjusted R square* yang diperoleh sebesar 0.922 yang menunjukkan bahwa tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan dipengaruhi oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Intelektual Wajib Pajak. sebesar 92.2% dan sisanya 7.8% (100% - 92.2%) dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Dengan demikian 92.2 % sangat baik digunakan dalam penelitian ini.

C. Interpretasi Hasil Penelitian

1. Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

Pada hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh signifikan Kesadaran wajib pajak (X_1) terhadap Tingkat Intelektual Wajib Pajak (Y) dapat dilihat pada nilai t_{hitung} sebesar 2.310. Berpengaruh secara signifikan dikarenakan nilai signifikan yang dilihat dari signifikansi (0.028) lebih kecil dari taraf signifikansi yang disyaratkan sebesar (0.05).

Pengaruh positif menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak sejalan dengan Efektivitas Pemungutan Pajak, jika Kesadaran Wajib Pajak baik maka dapat meningkatkan Efektivitas Pemungutan Pajak, demikian sebaliknya jika Kesadaran Wajib Pajak kurang baik atau maka Efektivitas Pemungutan Pajak kurang baik pula.

Penelitian ini sesuai dengan Marina Lestari (2013) tentang Efektivitas Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang menyatakan bahwa SIDJP memiliki performa sistem yang baik dilihat dari *hardware dan software* yang digunakan. Informasi yang dihasilkan SIDJP memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan, adanya kepuasan pengguna. Penggunaan SIDJP yang meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kinerja. Efektivitas Sistem Informasi suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh sistem informasi mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan. Menurut *McLeod dan Schell* dalam *Journal Marina Lestari 2013* ada 4 dimensi dasar informasi:

- a. Relevansi : informasi memiliki relevansi jika berkaitan langsung dengan masalah yang ada
- b. Akurasi : Idealnya semua informasi harus akurat, tapi peningkatan ketelitian sistem memerlukan biaya tambahan.

- c. Kecepatan waktu. Untuk memecahkan masalah seharusnya informasi tersedia sebelum terjadi situasi kritis. Informasi yang datang setelah keputusan dibuat tidak ada nilainya.
- d. Kelengkapan: Informasi dapat dikatakan lengkap ketika informasi tersebut mempunyai jumlah yang tepat dan menunjang semua area dimana keputusan akan dibuat.

Efektivitas sistem informasi adalah suatu tingkat ukur atas kegiatan yang terjadi pada produksi jasa, pelayanan, dan produktivitas yang lebih baik, dimana kegiatan tersebut meliputi input process dan *output* dari data – data atau fakta tentang kegiatan pemasaran perusahaan, menyangkut komponen yang terorganisasi terdiri dari: sistem kerja, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber data, manusia, dan sumber daya yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisa, menyimpan dan menyediakan produksi jasa, pelayanan, dan produktivitas yang lebih baik yang berguna dan berarti untuk pengambilan keputusan.

2. Tingkat Intelektual Wajib Pajak (X_2)

Pada hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh signifikan Tingkat Intelektual Wajib Pajak (X_2) terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak (Y) dapat dilihat pada nilai t_{hitung} sebesar 4.366. Berpengaruh secara signifikan dikarenakan nilai signifikan yang dilihat dari signifikansi (0.000) lebih kecil dari taraf signifikansi yang disyaratkan sebesar (0.05).

Pengaruh positif menunjukkan bahwa Pelayanan Pajak sejalan dengan Efektivitas Pemungutan Pajak, jika Tingkat Intelektual Pajak baik maka

dapat meningkatkan Efektivitas Pemungutan Pajak, demikian sebaliknya jika Tingkat Intelektual Wajib Pajak kurang baik atau buruk maka Efektivitas Pemungutan Pajak kurang baik pula.

Penelitian ini sesuai dengan Pedrito dos santos (2015) Tentang Efektivitas pelayanan dan pengawasan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak yang didasarkan bahwa sistem pelayanan yang baik, adil, efektif, dan efisien sebagaimana yang diharapkan masyarakat untuk menciptakan administrasi perpajakan yang baik dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat diperlukan sistem administrasi, fungsi dan organisasi kelembagaan yang baik, didukung kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang profesional. Karakteristik pelayanan yang harus dimiliki organisasi pemberi layanan menurut Nisjar dalam jurnal Pedrito dos Santos, 2015 antara lain:

- a. Prosedur pelayanan harus mudah dimengerti, mudah dilaksanakan, sehingga terhindar dari prosedur birokratik yang sangat berlebihan, berbelit – belit.
- b. Pelayanan diberikan dengan kejelasan dan kepastian bagi pelanggan
- c. Pemberi pelayanan diusahakan agar efektif dan efisien
- d. Pemberi pelayanan memberikan kecepatan dan ketetapan waktu yang ditentukan
- e. Pelanggan setiap saat mudah memperoleh informasi berkaitan pelayanan secara terbuka
- f. Dalam melayani, pelanggan diperlakukan motto "*Costumer is king and costumer is always righ*"

Melihat kriteria dan faktor pendukung pelayanan diatas, memang penting untuk membuat suatu birokrasi pemerintah yang simpel, mudah dipahami berorientasi kedepan, mempunyai pemimpin dan pegawai yang terampil serta didukung sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan pelayanan yang baik, efektif dan efisien.

BAB VI

PENUTUP

Pada bab terakhir ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, serta akan diuraikan beberapa keterbatasan penelitian dan saran-saran yang bermanfaat yang dapat digunakan pada penelitian selanjutnya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan bukti-bukti empiris yang diperoleh dari penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan telah memiliki kesadaran yang baik terutama pada bagian akuntansi dan keuangan. Penggunaan kesadaran dan kemampuan intelektual sangat bermanfaat untuk menunjang Pelayanan publik yang difokuskan pada tanggung jawab pemerintah secara sentral, regional, maupun lokal.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis uji T_{hitung} pada Kesadaran Wajib Pajak (X_1) dan Tingkat Intelektual Wajib Pajak (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak (Y) dikarenakan nilai signifikan Sistem Informasi Perpajakan sebesar $0,028 < 0,05$ dan Pelayanan Pajak sebesar $0,000 < 0,05$. Dinyatakan positif apabila Sistem Informasi Perpajakan (X_1) dan Pelayanan Pajak (X_2) baik maka dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. Demikian sebaliknya jika sistem informasi dan pelayanan pajak kurang baik maka efektivitas penerimaan pajak kurang baik pula.
3. Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Intelektual Wajib pajak terhadap efektivitas pemungutan pajak dapat meningkat dengan didasarkan pada

sistem pelayanan yang baik, adil, efektif, dan efisien sebagaimana yang diharapkan masyarakat untuk menciptakan administrasi perpajakan yang baik dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat diperlukan sistem administrasi, fungsi dan organisasi kelembagaan yang baik, didukung kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang profesional.

B. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari adanya beberapa keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Kuesioner hanya didistribusikan di KPP Pratama Makassar Selatan dan sampel yang digunakan adalah 32 Pegawai yang bersedia menjadi responden, sehingga generalisasi hasil penelitian ini tidak sepenuhnya diandalkan ruang lingkup yang lebih luas.
2. Metode pengumpulan data menggunakan metode survey melalui kuesioner memiliki kelemahan yaitu terdapat responden yang menjawab kuesioner secara tidak serius dan tidak dapat dikontrol.
3. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya.

C. Saran

Dari keterbatasan - keterbatasan di atas, penelitian selanjutnya disarankan untuk:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggabungkan metode survey melalui kuesioner dengan metode wawancara agar responden dapat memberikan jawaban yang seharusnya.

2. Penelitian yang akan datang disarankan agar responden mendapatkan penjelasan yang cukup sebelum melakukan pengisian kuesioner, sehingga pernyataan-pernyataan di dalam kuesioner dapat benar-benar dipahami maksudnya oleh responden.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, F. S. (2013). Pengaruh kesadaran membayar pajak pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan persepsi yang baik atas efektifitas. *Jurnal Efektivitas*, Vol.6: No.2
- Desca. Priatini Reni. (2011). Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pajak penghasilan *Jurnal penerimaan Pajak*.
- Dewi. S.R. (2013). Pengaruh pelaksanaan sistem *self assessment* terhadap kepuasan dan kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Wajib Pajak*. Vol.12: No.3.
- Ghozila, I. (2007). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi, D. (2008). *Administrasi Perpajakan*. Bandung: Mandar Maju, Gramedia Pustaka.
- Gita. L. Nyoman. (2014). Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan*. Vol. 2: No.10
- Harahap, H. N. (2013). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Hafsyah. N. Hidayah. H.(2014). Pengaruh pemeriksaan pelaksanaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Wajib Pajak*. Vol. 10: No 5
- Ibtida. (2010). *Definisi Pelayanan Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Lestari, Marina, dkk. 2013. *Efektivitas Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara*. Vol 6 No. 2.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan.edisi revisi*. Yogyakarta.
- Mochlis, S. 2013. *Psikologi Belajar*. Surabaya: Pena Salsabila
- Nasucha, C. (2005). *Reformasi Administrasi Publik Teori Dan Publik*. Yogyakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nurmantu, S. (2011). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Rahay Siti, K. (2010). *Perpajakan Indonesia. Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Riduwan dan Kuncoro, E. A. (2007). *Cara Menggunakan dan Memakai Analisis(path analysis)*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Rosdiana, H. (2010). *Pengantar Perpajakan* . Depok: Tanpa Penerbit.
- Santos, Dos Pedrito, dkk. 2015. *Efektivitas Pelayanan dan Pengawasan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak*. Vol. 4.
- Singgih, S. (2012). *panduan lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak. Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Suhartono, R. d. (2010). *Ensiklopedia Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sofa. P. (2008: 2). *Definisi kepatuhan perpajakan*. Surabaya: Mitra Pusaka
- Waluyo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- _____ (2012). *Akuntansi Pajak. Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____ *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia*. Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak.
- _____ (2011). *Perpajakan Indonesia. Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.

RIWAYAT HIDUP



ARDI, lahir di Bolli (Enrekang) 19 November 1993. Anak ketiga dari tiga bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Abdullah dan Dahara. Ada pun jenjang pendidikan yang penulis lalui yaitu masuk ke SDN 84 Bolli mulai tahun 2001 sampai tahun 2006. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Maiwa dan tamat pada tahun 2009. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA NEGERI 1 MAIWA dan tamat tahun 2012. Kemudian pada tahun 2012 penulis berhasil lulus pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar program strata 1 (S1). Dan pada tahun 2018, akan menyelesaikan masa perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul skripsi :“Pengaruh Kesadaran dan Tingkat Intelektual Wajib Pajak terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak.